

EVALUASI PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PERSPEKTIF GENDER DI KOTA TERNATE

Misrina¹

¹Universitas Khairun Ternate

sergimisrina@gmail.com¹

Abstract

This article describes the evaluation of the implementation of fisheries product processing and marketing program in Ternate City. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with informants selected based on purposive sampling. The theory used to evaluate is the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The results of the research found problems in the program implementation process that fishermen's wives did not benefit from various activities so it can be concluded that the program must be reviewed so that the beneficiaries can be expanded, especially fishermen's wives who are still living in poverty. The novelty of this research is that the value of justice for women is at the core of this evaluation. This program should provide help to coastal women who live difficult lives during seasonal changes. The implication of this research is that the sustainability of fisheries product processing programs should prioritize the principle of justice for poor coastal communities.

Program Evaluation, Gender Justice, Fisheries Product Processing Market.

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan menjadi sector unggulan di Kota Ternate dimana kondisi geografis yang memiliki luas wilayah laut lebih besar daripada daratan yaitu 5.795, 5 km dengan panjang garis pantai sepanjang 124 km merupakan peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan di wilayah Kota Ternate. Salah satu langkah kongkrit untuk memanfaatkan sumber daya laut adalah dengan menciptakan program pengolahan hasil perikanan. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan perikanan yang besar karena didukung

sumber daya laut menjadikan suatu daerah disebut sebagai wilayah lumbung ikan atau kawasan minapolitan atau kota perikanan (Rahmawati, 2017). Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan membuka kesempatan untuk pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada nilai tambah produk olahan secara teknis dan non teknis (Nurhayati, 2004 Singgih, 1991). Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pendampingan manajemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tujuannya untuk mengelola produk olahan ikan.
2. Pengadaan sarana & prasarana kemasan produk olahan perikanan bertujuan untuk dukungan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) dibidang kelautan dan perikanan yang masih menggunakan kemasan produk yang sederhana
3. Pengadaan sarana rantai dingin (coolbox) bertujuan untuk mendukung pelaku usaha perikanan dan nelayan dalam menjaga mutu ikan agar tetap sehat dan segar.
4. Pemberian Sertifikat halal dan sertifikat produk industry rumah tangga (PIRT) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk olahan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi serta syarat untuk produk olahan perikanan bisa masuk pada pasar modern.

Melihat program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Ternate maka perlu dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan bermanfaat untuk perbaikan program dimasa akan datang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana evaluasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dengan menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, proses dan produk.)

METODE PENELITIAN

Penelitian evaluasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate. Tujuan penelitian kualitatif juga untuk memahami situasi dan peristiwa serta interaksi sosial yang terjadi dalam proses implementasi program (Creswell, 2012). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan program pengolahan hasil perikanan. Sumber informan yang diambil dalam penelitian berdasarkan kebutuhan yaitu Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi Pengolahan dan Promosi Usaha Perikanan, 2 Penyuluh Perikanan dan 5 pegawai pelaksana program. Teknik Pengumpulan data dengan cara pertama wawancara mendalam, kedua mengadakan fokus grup dengan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate. Ketiga analisa dokumen pelaksanaan program dari panitia pelaksana kegiatan dan dokumen evaluasi anggaran dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate. Penarikan kesimpulan melalui pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data serta verifikasi data (Miles & Huberman, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada aspek context menjelaskan tentang isu dan masalah yang terjadi sehingga adanya program, aspek input menguraikan persiapan dan perencanaan sebelum program di laksanakan, aspek proses menjelaskan pelaksanaan berbagai kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dan aspek produk menjelaskan hasil serta capaian dari implelementasi program.

Aspek Context

Dasar Hukum Pelaksanaan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah merupakan perwujudan dari arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate. Pada aspek ini pada hakekatnya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini untuk memperdayakan istri nelayan dalam menghadapi masa paceklik ketika nelayan tidak bisa melaut karena telah habis musim ikan atau masalah cuaca yang dihadapi nelayan sehingga tidak bisa melaut, sehingga program ini ada untuk memberdayakan istri mereka agar bisa menjual produk hasil olahan tangkapan para suami dimusim panen dan dapat dijual pada musim paceklik.

Aspek Input

Syarat dan kriteria menjadi peserta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah masyarakat yang telah memiliki usaha hasil perikanan dan masyarakat yang berkeinginan untuk membuka usaha hasil perikanan. Jadwal pelaksanaan program bertepatan dengan pencairan dana APBD yaitu pada bulan Maret-Desember. Jumlah pendamping program adalah mereka yang aktif sebagai pegawai Dinas Perikanan Dan Keluatan Kota Ternate di Bidang Penguatan Daya Saing Produk. Dana digunakan secara efektif sehingga tercapai tujuan kegiatan/program.

Aspek Proses

Proses implementasi program diikuti oleh oleh 30 perempuan pelaku usaha perikanan. Temuan lapangan tentang masalah pelaksanaan diwilayah Kota Ternate ternyata istri nelayan yang hidup di pesisir tidak pernah mendapatkan program hal ini disebabkan 1) kinerja pemerintah terkait tentang keberpihakan pada masyarakat pesisir yang dinilai susah diperdayakan, 2) Pengaruh keyakinan budaya masyarakat etnis ternate dalam berkehidupan sosial dan ekonomi, 3) tidak ada kordinasi antara pelaksana program dan penyuluh perikanan sehingga istri nelayan terabaikan dari kegiatan.

Aspek Produk

Hasil atau capain dari program pengolahan hasil perikanan yang telah diimplementasikan dapat dilihat dari uraian tabel dibawah ini.



Tabel 1.

Capaian Target Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Perikanan Kota Ternate Tahun 2020

Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Output	Capaian target (%)
Pendampingan Manajemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang manajemen dalam pengelolaan usaha bagi KUB dan Poklasar	Jumlah ragam olahan yang diproduksi lebih variatif	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	27 Kelompok	Terbentuknya 30 KUB dan Poklasar	120%
Pengadaan Alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang produksi di rumah kemasan	Kelancaran operasional produksi bagi KUB dan Poklasar	10 unit sarana penunjang	25 Poklasar	Pemberdayaan 25 UKM	100%
Pengadaan sarana rantai dingin (coolbox)	Menjaga hasil tangkapan nelayan/pemasar tetap layak di konsumsi	Mempertahankan kualitas ikan segar	200 pc Coolbox	27 pelaku usaha	27 unit untuk 20 Pelaku Usaha	100%
Sertifikat KUB dan Poklasar	Peningkatan kapasitas	Dapat bersaing dengan	Kelompok Pengol	27 Kelompok	30 Kelompok	100%

(IRT & sertifikat halal)	produk olahan yang aman dan sehat	produk-produk sejenis dari luar daerah	ahan dan pemasaran hasil perikanan	pengolah	bersertifikat	
--------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	----------	---------------	--

Sumber: hasil riset lapangan, 2019.

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mencapai target program. Hal ini dilihat dari realisasi setiap kegiatan 1) Pendampingan manajemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan target kegiatan memenuhi 27 kelompok usaha tetapi target yang dicapai berhasil melaksanakan kegiatan kepada 30 pengolah perikanan (120%) diketahui bahwa kegiatan ini berupa pelatihan bakso ikan dan nugget ikan untuk menambah variasi produk kelompok pengolah lebih menarik. 2) Pengadaan alat dan prasarana kemasan produk olahan perikanan mencapai target 25 UKM/IKM perpengolah perikanan mendapat bantuan kemasan produk. 3) Pengadaan sarana rantai dingin (coolbox) merupakan kegiatan pemberian alat penyimpanan ikan agar tetap segar bagi pelaku usaha ikan, capaian target 100% terpenuhi dari rencana 27 unit coolbox untuk 20 pelaku usaha berhasil tersalurkan dengan efektif. 4) Sertifikat halal dan industri rumah tangga merupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia, Badan pengawas obat dan makanan, untuk memberikan praktek pengolahan makanan yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Setelah para kelompok pengolah mengikuti sosialisasi dan praktek, Dinas Kesehatan, MUI dan BPOM melaksanakan survey ke lokasi pengolah hasil perikanan untuk melihat keadaan serta kualitas kesehatan pengolahan produk ikan. Rencana awal dilakukan pada 27 pelaku usaha tetapi realisasi pada 30 kelompok artinya kegiatan ini berhasil dan melebihi target capaian.

Relevansi antara Tujuan dan implementasi program dilapangan

Evaluasi tahap pengukuran pada konteks yaitu mencakup keadaan lingkungan para pemangku kepentingan dalam program atau stakeholder. Aspek ini akan mengukur sejauh mana relevansi tujuan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan identifikasi masalah atau isu yang menyebabkan program ini menjadi penting untuk dirumuskan. Selain identifikasi latar belakang adanya program, pada tahap ini juga akan menguraikan strategi-strategi yang diambil oleh stakeholder untuk mencapai tujuan. Analisa Kebutuhan Masyarakat. Berdasarkan hasil riset lapangan menyatakan bahwa pada hakekatnya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini untuk memperdayakan istri nelayan dalam menghadapi masa paceklik ketika nelayan tidak bisa melaut karena telah habis musim ikan atau masalah cuaca yang dihadapi nelayan sehingga tidak bisa melaut, sehingga program ini ada untuk memberdayakan istri

mereka agar bisa menjual produk hasil olahan tangkapan para suami dimusim panen dan dapat dijual pada musim paceklik. Sehingga masalah yang ada dilingkungan masyarakat nelayan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi pada masa krisis pasca panen bisa disiasati dengan mengikuti program ini. Yang diharapkan adalah para istri mempunyai skill dalam mengolah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga pesisir. Struktur daerah kepulauan membuat masyarakat sangat dekat dengan kehidupan pesisir dan juga menjadikan sumber laut sebagai kehidupan mereka. Peningkatan hasil tangkapan ikan di Maluku Utara khususnya di Ternate, merupakan wilayah penghasil ikan tuna, ikan cakalang yang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini memicu adanya program pengolahan hasil perikanan untuk menambah penghasilan serta bentuk produktifitas masyarakat pesisir dalam hidup yang berkelanjutan. Seperti pengolahan ikan cakalang menjadi Abon Ikan, Bakso Ikan, Ikan fufu (asap), sambal ikan yang menjadikan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga di pesisir.

Aspek input adalah tahapan evaluasi tentang persiapan sumber daya untuk persiapan pelaksanaan program. Hal ini menyangkut dengan persyaratan untuk menjadi peserta program, kriteria penyelenggaraan program serta kriteria pelaksana program. Termasuk dalam penentuan jadwal pelaksanaan program, jumlah pendamping yang dibutuhkan serta strategi yang dipakai dalam pelaksanaan program termasuk dalam penggunaan dana. Distribusi tugas Dan tanggungjawab penyelenggara program Untuk menyiapkan sumber daya dan sarana prasarana program telah dibagi tugas pada masing-masing kepala seksi untuk menyiapkan sarana prasarana dalam melakukan kegiatan. Salah satu yang penting untuk disiapkan adalah peserta program yaitu syarat untuk menjadi peserta program optimaslisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Tidak ada syarat dan kriteria khusus untuk menjadi peserta program yang penting adalah calon peserta berkeinginan untuk mengolah hasil perikanan dan atau mereka yang ingin mengembangkan hasil usaha perikanan yang telah berjalan.

Dari hasil kajian dilapangan persiapan pelaksanaan program disiapkan seadanya tanpa prosedur sehingga penyiapaan dilakukan tidak tersistem secara baik. Jadwal yang rencanakan sesuai dengan pencairan dana untuk kegiatan yakni di bulan Maret-September. Begitupun dengan pelaksana program, tidak ada kriteria atau syarat khusus menjadi pendamping program karena yang menjalankan program adalah Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi serta Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan dibantu oleh delapan orang staf lapangan.

Tata Kelola Program Pengolahan Hasil Perikanan

Pada tahap evaluasi proses, aspek yang dilihat adalah implementasi program mulai dengan sosialisasi program, seleksi, penetapan, penentuan waktu, sarana dan prasarana, materi serta hambatan yang dialami pada proses pelaksanaan kegiatan. Dalam proses melaksanakan kegiatan,



pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan melakukan tahapan tahapan dalam rangka persiapan program agar dapat tercapai tujuan dan sasaran program. Langkah-langkah tersebut yang terdiri dari

Pada tahap sosialisasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pihak Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan setiap awal tahun anggaran selalu memberikan sosialisasi dan kordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan program dilakukan setiap bulan Maret-Desember. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan mengikuti pencairan dana oleh pemerintah setempat, kadang mengalami masalah waktu pelaksanaan kegiatan karena menunggu proses pencairan dana. Ini merupakan faktor kendala dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan. Pada akhirnya setiap kegiatan yang telah disusun dengan jadwal yang baik akan mengalami kesulitan diakhir tahun harus melaksanakan tumpukan kegiatan dalam waktu yang singkat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Bidang Penguatan Dan Daya Saing Produk yang bertanggungjawab atas terlaksananya program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Proses pelaksanaan dinilai oleh Kepala Bidang tentang kinerja pegawai. Berikut aspek penilaian kinerja pegawai dilihat dari 1) Perilaku dalam kegiatan meliputi moralitas pegawai, sopan santun serta etika dalam bekerja. 2) Aktifitas dalam memberikan pelayanan kepada sasaran program dalam kegiatan. Hal ini dilihat dari sosialisasi dan proses pengetahuan kegiatan yang diberikan pelaksana kepada kelompok usaha 3) Integritas pegawai dalam pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penentu tercapainya tujuan program, dilihat dari proses adaptasi pegawai dengan sesama pelaksana program maupun dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Dinas sehingga tata kelola kegiatan bisa berjalan dengan baik. 4) Disiplin pegawai dalam proses pelaksanaan, ketetapan waktu kegiatan dan tata laksana kegiatan sehingga dapat memaksimal waktu dan tempat untuk mencapai tujuan. 5) Kerjasama pegawai untuk mencapai tujuan kegiatan relasi antar pelaksana akan menunjang keberhasilan program. Kepala Bidang melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pegawai dan kegiatan dalam program pengolahan hasil perikanan setiap tiga bulan.

Aktivitas Peserta Program, Peserta dalam program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari kelompok perempuan maupun individu yang bergerak dalam usaha perikanan.



Gambar 1. Praktek Olahan Ikan



Gambar 2 Pelaku Usaha Ikan Asap



Gambar 3 Pemberian Sertifikat Halal/ PIRT

Aktifitas peserta program yang terdiri dari pelaku usaha perikanan yang antusias pada berbagai kegiatan seperti kegiatan praktek olahan ikan peserta diberikan kegiatan untuk mengolah ikan dengan berbagai varian rasa dari jenis ikan yang berbeda-beda. Kemudian pada gambar 2 pelaku usaha ikan asap yang telah menerima bantuan rantai dingin untuk menyimpan ikan mentah yang akan diolah menjadi ikan asap. Pada gambar 3 pelaku usaha menerima sertifikat halal/PIRT setelah mengikuti sosialisasi dan juga survey dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate.

Sarana dan Prasarana, Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang proses kegiatan atau semua fasilitas untuk mendukung suksesnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Sarana yang digunakan dalam kegiatan Sertifikat PIRT dan Srtifikat Halal adalah handout, alat tulis, papan tulis, LCD Proyektor sedangkan prasarana yang digunakan adalah Aula Dinas Perikanan Kota Ternate, Rumah Kemasan Dinas Perikanan Kota Ternate.

Kelayakan Materi, Materi yang diberikan oleh Dinas Perikanan terkait kegiatan pendampingan manajemen kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah cara mengolah produk yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sertifikat produk industri rumah tangga dan sertifikat halal. Dilihat dari relevansi kebutuhan pengolahan dan materi ini sangat membantu untuk proses pemasaran produk karena salah satu syarat pemasaran produk adalah harus telah memiliki sertifikat PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI.

Metode Dalam pelaksanaan program. Metode yang digunakan dalam kegiatan pemberian sertifikat PIRT dan Halal, Kegiatan pembuatan bakso ikan sudah cukup memadai dengan proses pembelajaran yang digunakan ceramah, tanya jawab, simulasi dan praktek. Setiap pemateri juga memiliki metode tersendiri dalam menyampaikan materi sehingga menarik perhatian peserta kegiatan.

Hambatan dalam pelaksanaan program

Berdasarkan riset lapangan, kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kota Ternate adalah masalah istri nelayan. Data yang diperoleh tentang kelompok atau individu pengolahan hasil perikanan tidak ada perempuan yang berasal dari keluarga nelayan. Padahal program ini hadir untuk membantu istri nelayan dalam mengolah hasil tangkapan suami (nelayan) untuk menjadi barang ekonomis yang bisa dijual pada masa nelayan tidak bisa melaut atau musim paceklik. Penyuluh perikanan Kota Ternate mendata ada 35 orang istri nelayan tidak pernah mendapat program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dari Dinas Perikanan Kota Ternate.

Pada aspek produk memperlihatkan capaian hasil program dari adanya kegiatan ini terbina kelompok/individu usaha hasil perikanan yang terpenting dari program ini adalah terbentuk kelompok usaha yang bersertifikat sehingga produk mereka dapat dijual dan bersaing dengan produk lainnya di luar Kota Ternate. Sedangkan hasil dari program ini adalah terbentuk kelompok-kelompok pengolahan, berhasil memberdayakan 25 IKM dalam memberikan kemasan yang menarik bagi produk olahan. Serta 30 kelompok telah menerima sertifikat halal dan PIRT untuk kegiatan 3 tahun terakhir. Adapun Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate yang berperan sebagai pemateri dan uji lapangan/laboratorium terkait produk olahan. Manfaat yang dirasakan perempuan peserta program adalah dapat memasarkan hasil produk ke pasar modern dan hal ini berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.

Salah satu nilai terpenting dalam implementasi program adalah nilai keadilan, hal ini berkaitan dengan distribusi materi serta manfaat program bagi seluruh masyarakat. Jika dalam proses pelaksanaan terjadi ketidakadilan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat, program dan kegiatan harus diperbaharui agar pemerataan dan nilai keadilan dapat



diterapkan. Seperti pada pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terjadi ketidakmertaan dalam proses distribusi materi dibuktikan dengan tidak terlibatnya istri nelayan yang setiap hari membantu suaminya sebagai nelayan. Hidup nelayan tradisional yang masih miskin membutuhkan intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai evaluasi model CIPP dalam pelaksanaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Ternate yang bertujuan untuk menjelaskan hasil program yang telah 3 tahun diimplementasikan. Dari aspek context program tidak memiliki petunjuk teknis yang dibuat oleh pengambil kebijakan untuk implementasi program. Pada aspek input menunjukkan persiapan dan perencanaan program yang tersistematis, pada aspek proses yaitu tahap implementasi program terjadi kendala pada distribusi nilai keadilan pada pemberian manfaat program kepada masyarakat, temuan lapangan membuktikan bahwa masyarakat nelayan yaitu istri nelayan tidak dapat mengambil manfaat dari program. Padahal istri nelayan merupakan agen pengolah hasil perikanan dari hasil tangkapan suami mereka sebagai nelayan. Kondisi ekonomi masyarakat nelayan tradisional yang miskin seharusnya mendapat pelayanan dari program pengolahan hasil perikanan. Istri mereka adalah aktor penting dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka membantu menjual ikan hasil tangkapan dan jika terkendala cuaca dan musim paceklik mereka mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan peminjaman uang. Pada aspek produk memperlihatkan keberhasilan dengan tercapainya sasaran dan tujuan program.

Tujuan dari evaluasi context, input, proses dan produk adalah bukan semata melihat tercapainya tujuan program tetapi memberikan informasi kendala yang dihadapi pada proses implementasi program kepada pengambil keputusan agar menjadi bahan rujukan perbaikan program di masa akan datang. Sehingga dari hasil evaluasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat disimpulkan beberapa temuan yang signifikan yaitu pada aspek proses.

Terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam pemberian manfaat program terhadap masyarakat nelayan atau istri nelayan. Masyarakat nelayan yang mata pencaharian utama keluarga adalah mengolah dan menjual hasil perikanan tidak terakomodir sebagai penerima manfaat program. Sehingga program ini membutuhkan perbaikan dan pengembangan program yang mengutamakan aspek keadilan dan pemerataan penerima manfaat program.

REFERENSI

Chambers, Donald E. and Kenneth R. Wedel. 2005. Social Policy and Social Program: a Method for the Practical Public Policy Analyst. Boston : Pearson Education Inc.



- Daniel L. Stufflebeam, Chris L. S. Coryn. 2014. Evaluation Theory, Models, and Applications. 2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
- Denzim, Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2000. Handbook of qualitative research 2nd edition. London: Sage Publication, Inc. International Educational Profesional Publisher
- Midgley, James, Martin B. Tracy and Michelle Livermore. 2000. Introduction: Social Policy and Social Welfare. London.
- Miles, M. Huberman, M. & Saldana, J. 2014. Qualitatif Data Analysis: A Methode Sourcebook (3rd ed). New York: SAGE Publication, Inc.
- Monchai, Tiantong, Pramote Tongchin. 2013. A Multiple Intelligences Supported Web-based Collaborative Learning Model Using Stufflebeam's CIPP Evaluation Model. International journal of humanities and social science. 159
- Nurhayati, Popong. 2004. Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan Pada Industri Perikanan Tradisional di Provinsi DKI Jakarta. Buletin Ekonomi Perikanan Vol. V. No. 2.
- Rahmawati, Dwi. 2017. Pengaruh Industri Olahan Ikan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Kaus Kabupaten Lamongan . Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rochmulaningsih, Yeth., Sulistiyono, S., Masruroh, N., Maulany. 2019. Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economi. Marine Policy 108 (2019) 103602
- Stufflebeam, D.L. H McKee and B McKee. 2003. The CIPP Model For Evaluation. Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN). Portland , Oregon.